REVOLUSI, ANGKATAN BERSENDJATA & PARTAI KOMUNIS

D. N. AIDIT

REVOLUSI, ANGKATAN BERSENDJATA & PARTAI KOMUNIS (PKI dan AURI)

II

D.N. Aidit

Menko/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1964

Sekedar Pengantar

Untuk kedua kalinja, pada tanggal 17 Maret 1964, Menko/Wakil Ketua MPRS dan Ketua CC PKI D.N. Aidit telah memberikan tjeramah dihadapan para perwira AURI — kali ini dihadapan para mahasiswa Sekolah Staf Komando AURI (SESKOAU), Djakarta.

Tjeramah jang diberi djudul Pembangunan PKI dan Revolusi Indonesia, dengan seizin pentjeramahnja dibukukan dengan nama Revolusi, Angkatan Bersendjata & Partai Komunis.

Semoga penerbitan ini bisa sekedar memberikan sumbangan untuk lebih memperkuat tradisi persatuan jang sudah lama ada antara PKI dan Angkatan Bersendjata umumnja dan AURI chususnja guna menjelesaikan tuntutan Revolusi Agustus 45 dan untuk melaksanakan Triprogram Pemerintah jaitu : a. sandangpangan; b. penggangjangan „Malaysia", dan c. meneruskan pembangunan.

Penerbit

Djakarta, Djuni 1964

Saja menjambut baik dan menjatakan terima-kasih atas undangan jang diberikan kepada saja, baik sebagai Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia maupun sebagai Wakil Ketua MPRS untuk memberikan tjeramah dihadapan para perwira Sekolah Staf Komando AURI (SESKOAU). Tjeramah saja hari ini bukan tjeramah untuk pertama kalinja dihadapan para perwira Angkatan Udara Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 April tahun 1963 saja telah memberi tjeramah kepada para perwira AURI, jang ketika itu saja beri djudul : *Manipol-Usdek bukan hanja tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan Marxisme.*

Tidak ber-lebih²an kalau saja katakan bahwa saling mengerti dan persatuan makin hari makin bertambah erat antara setiap Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, termasuk AURI, dengan berbagai golongan Rakjat Indonesia, termasuk kaum Komunis. Tradisi persatuan sudah dimulai sedjak berkobarnja Revolusi Agustus 1945 dan kemudian semua orang revolusioner berusaha keras untuk mengembangkannja.

Sekarang sudah tidak dirasakan djanggal lagi bahwa pemimpin Komunis berbitjara menguraikan pendirian²nja dihadapan perwira² Angkatan Bersendjata RI. Sebaliknja jang djanggal jalah anggapan jang mengira bahwa jang wadjar ini sebagai suatu kedjanggalan. Memang, jang lapuk selama-

nja menentang jang baru, tetapi tentangan itu tidak menghentikan perkembangan jang baru. Sebaliknja mempertjepat proses pembusukan dari jang lama dan reaksioner itu sendiri.

Tjeramah kali ini saja beri djudul: *Pembangunan PKI dan Revolusi Indonesia*. Sesuai dengan permintaan dalam surat Saudara², tjeramah ini akan mentjakup berbagai masalah seperti masalah sedjarah PKI, hubungan PKI dengan program bersama Manipol dan tugas² urgen PKI. Sudah tentu, mengingat sempitnja waktu, saja akan membatasi diri pada beberapa soal jang pokok dan penting sadja.

Seperti jang sudah saja tegaskan baik dalam tieramah saja di SESKOAD (29 Djuni 1963) maupun di SESKOAL (16 Djuli 1963), satu²nja tjara jang tepat didalam membahas segala soal politik dan sosial haruslah dalam hubungan dengan Revolusi Indonesia. Djuga dalam usaha memahami PKI tidaklah bisa tepat apabila tidak dihubungkan dengan Revolusi Indonesia. PKI dan Revolusi Indonesia adalah dwitunggal jang tak dapat dipisah²kan. Semakin kita memahami PKI, semakin djelas dan menjeluruh pengertian kita tentang Revolusi Indonesia. Demikian pula, semakin kita memahami Revolusi Indonesia, semakin terang dan mendalam pengertian kita tentang PKI. Lagi pula, hanja dengan demikian orang bisa terhindar dari segala matjam penjakit phobi²an, termasuk Komunisto-phobi, dan bisa dengan teguh mendjadi peserta aktif dalam Revolusi Indonesia.

Tjeramah ini saja bagi dalam dua bagian:

Jang pertama: *Tentang Soal² Pembangunan PKI*, dan jang kedua, *Tentang Soal² Revolusi Indonesia*.

I. TENTANG SOAL² PEMBANGUNAN PKI

Sebagaimana halnja dengan partai² revolusioner lainnja, PKI adalah sudah merupakan alat revolusi sebelum Revolusi Agustus 1945 petjah, sebelum kita mempunjai alat² revolusi lainnja seperti jang kita kenal sekarang ini. Walaupun para hadirin bukan anggota PKI, tetapi saja dengan segala senang hati memenuhi permintaan Sdr² menguraikan tentang pembangunan PKI. Tiap warganegara Indonesia berhak mengetahui segalasesuatu tentang PKI, karena PKI adalah djuga milik nasion, dan bukan hanja milik kaum Komunis Indonesia.

PKI adalah Partai klas buruh Indonesia, Partai kaum Marxis Indonesia, jang didirikan pada tgl. *23 Mei 1920*, sebagai perkembangan lebih landjut dari *ISDV* (Indische Sociaal Democratische Vereniging atau PSDH — Perhimpunan Sosial Demokratis Hindia), jaitu organisasi kaum Marxis jang pertama di Indonesia jang berdiri dalam tahun 1914. Lahirnja PKI bukanlah gedjala kebetulan,

tetapi gedjala objektif. PKI lahir dalam zaman imperialisme jang melahirkan klas buruh di Indonesia, PKI lahir sesudah ada serikatburuh² di Indonesia, lebih² sesudah ada ISDV, dan sesudah dunia terbelah mendjadi dua kubu, kubu sosialis dan kubu kapitalis dengan menangnja Revolusi Sosialis di Rusia tahun 1917. Ia merupakan produk jang wadjar dari perkembangan perdjuangan klas ditanahair kita, dari perkembangan sedjarah masjarakat kita. Oleh karenanja kaum Komunis Indonesia sering mengatakan bahwa *PKI adalah anak zaman jang lahir pada waktunja.*

Di-waktu² jang lalu ada orang² jang suka menfitnah bahwa PKI adalah „barang import" atau „tidak asli". Pandangan sedemikian bukan hanja tidak benar menurut kenjataan sedjarah, tapi djuga samasekali tidak ilmiah. Kalau setjara objektif dan ilmiah klas burdjuis ketjil dan burdjuis nasional Indonesia memerlukan adanja partai² politik guna memperdjuangkan kepentingan² politiknja, maka adalah djuga objektif dan ilmiah djika klas buruh Indonesia memerlukan PKI untuk memelopori perdjuangan bagi kepentingan² politiknja. Dapatlah kita bajangkan betapa terbelakangnja gerakan buruh dan gerakan Rakjat pekerdja Indonesia seandainja tidak ada PKI jang memelopori gerakan ini.

PKI termasuk partai politik jang tertua diantara 10 partai politik jang ada dan sah sekarang ini.

Sudah sedjak lahirnja PKI selalu merupakan bagian jang takterpisahkan dari gerakan kemerdekaan nasional, dan selalu mengintegrasikan diri dengan gerakan Rakjat Indonesia. Apakah jang demikian itu „barang import" ? Tidak, PKI adalah anak kandung daripada tingkat tertentu perkembangan sedjarah Indonesia. Ini adalah kenjataan, betapapun disangkal, ia tetap kenjataan. Ketika kaum Komunisto-phobi jang kita kenal sekarang ini masih ingusan dan mungkin diantaranja ada jang sedang asjik menjembah pemerintah kolonial, atau mungkin belum lagi lahir, PKI sudah berdjuang mati²an melawan kolonialisme untuk Indonesia jang merdeka dan berdaulat.

Adjaran Marxisme-Leninisme jang mendjadi pedoman PKI adalah universil. Sebagaimana semua adjaran universil ia bisa mendapat tempat dimanapun didunia ini. Tetapi sebagaimana pula halnja dengan adjaran universil lainnja, ia hanja bisa berakar disesuatu negeri djika ia mengintegrasikan diri dengan penduduk negeri itu. Dalam hal ini, mengenai PKI seudjung rambutpun tidak bisa diragukan. Bukan hanja dengan klas buruh, tetapi djuga dengan massa kaum tani dan Rakjat pekerdja lainnja, dan bahkan dengan seluruh nasion, PKI sudah dan sedang mengintegrasikan dirinja. Dalam rangka pengintegrasian ini, PKI sudah dan sedang dengan berhasil meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme, mewudjudkan kebe-

naran universil Marxisme-Leninisme mendjadi kebenaran kongkrit dan kenjataan kongkrit di Indonesia.

Perkembangan PKI hingga kini, pada pokoknja dapat dibagi dalam 4 periode sbb. :

Periode I : periode pembentukan Partai dan perdjuangan melawan teror putih pertama (1920 — 1926).

Periode II : periode perdjuangan dibawah tanah dan front anti-fasis (1926 — 1945).

Periode III : periode Revolusi Agustus 1945 dan perdjuangan melawan teror putih kedua (1945 — 1951).

Periode IV : periode front nasional dan pembangunan Partai (1951 — sampai sekarang).

Saja tidak bermaksud untuk menguraikan perkembangan PKI periode demi periode, tapi hanja akan menjebut beberapa soal jang penting. Selama Partai masih dalam masa kanak², Partai belum dapat memahami keadaan masjarakat Indonesia dan soal² dari Revolusi Indonesia, dan djuga belum dapat menarik peladjaran dari pengalaman²nja sendiri. Makaitu ketika Revolusi Agustus 1945 petjah, PKI masih belum berhasil mendorong revolusi mentjapai kemenangan penuh. Tetapi sesudah PKI mengindjak mendjadi dewasa sedjak pembangunannja kembali dalam tahun 1951, dan terutama sekali sedjak Kongres Nasional Ke-V

PKI dalam bulan Maret tahun 1954, maka PKI berkat pandangannja jang tepat sudah mulai mengenal sifat masjarakat Indonesia dan dapat memetjahkan setjara tepat soal² pokok Revolusi Indonesia serta mulai menjimpulkan pengalamannja tentang front nasional, perdjuangan revolusioner bersendjata dan pembangunan Partai. Tahun 1951 telah mendjadi titikbalik bagi kehidupan PKI. Sedjak itu PKI telah dibangun kembali berdasarkan Konstitusi baru dan berdasarkan gerakan perluasan organisasi dan anggota, jang disertai dengan pendidikan tentang Marxisme-Leninisme dan tentang soal² pokok Revolusi Indonesia.

Ketjuali sebagai periode pembangunan Partai, periode sekarang ini bagi PKI adalah djuga periode pembangunan front nasional.

1) MENGENAI FRONT NASIONAL

Sedjarah gerakan kemerdekaan nasional Indonesia sendiri telah menundjukkan tentang mutlak perlunja persatuan nasional atau front nasional. PKI jakin, bahwa salahsatu faktor jang menentukan akan kemenangan perdjuangan pembebasan nasional Indonesia jalah adanja persatuan nasional revolusioner. Makaitu PKI dengan gairah menjambut tulisan Bung Karno dalam tahun 1926 dengan djudul *„Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme"* jang dimuat sebagai tulisan pertama dalam buku *„Dibawah Bendera Revolusi"* dimana ditekankan tentang perlunja persatuan antara kaum Nasional-

is, kaum Agama, chususnja Islam, dan kaum Marxis. Tahun 1926 tidak hanja telah dikenal sebagai tahun Pemberontakan Nasional bulan November 1926, tapi djuga sebagai tahun dirumuskan ide *kegotong-rojongan* dari 3 aliran besar di Indonesia, jaitu aliran² politik *Nasionalis, Islam dan Marxis*, embrio gagasan *Nasakom*. Kalau mau tahu akar sedjarah Pantja Sila, inilah permulaannja!

Ide gotongrojong jang menjatupadukan 3 aliran politik jang besar itu terus mendjiwai gerakan kemerdekaan nasional. Hal ini tidak hanja terbukti dalam perdjuangan anti-fasis jang dipelopori oleh Gerindo (Gerakan Rakjat Indonesia) mendjelang perang dunia kedua, tapi djuga selama pendudukan Djepang. Djuga dalam masa perang dunia kedua dan masa bekerdja dibawah tanah, perdjuangan bangsa kita tetap berdasarkan persatuan nasional jang berporoskan Nasakom.

Hal ini nampak dengan djelas pada waktu Bung Karno mengusulkan ide Pantja Sila sebagai *alat pemersatu* bangsa dan dasar daripada Republik Indonesia. Tentang inti Gotongrojong ini dikatakan oleh Bung Karno sbb.: „Djikalau saja peras lima mendjadi tiga dan jang tiga mendjadi satu, maka dapatlah satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan Gotongrojong! Alangkah hebatnja Negara gotongrojong!" (*Tubapi*, hal. 29).

Gotongrojong jang mendjadi peras an dari Pantja Sila adalah terang Gotongrojong berporoskan Nasakom, karena Pantja Sila itu sendiri adalah alat jang mempersatukan 3 aliran besar, jaitu aliran Nasionalis, Islam dan Marxis sebagaimana jang dinjatakan Bung Karno dalam tahun 1926, atau 3 aliran besar seperti jang kita kenal sekarang, jaitu Nasionalis, Agama dan Komunis. Djika golongan Nasionalis dalam Pantja Sila terutama diwakili oleh Sila Kebangsaan, golongan Agama terutama diwakili oleh Sila Ketuhanan Jang Maha Esa, maka golongan Komunis terutama diwakili oleh Sila Keadilan Sosial atau Sosialisme.

Tetapi, seperti sering dikemukakan oleh Presiden Sukarno „Pantja Sila adalah alat pemersatu! Pantja Sila bukan alat pemetjah-belah! Dengan Pantja Sila kita djuga mempersatukan tiga aliran besar jang bernama Nasakom itu. Djadi djangan mempergunakan Pantja Sila untuk mengadudomba antara kita dengan kita. Djangan mempergunakan Pantja Sila untuk memetjah-belah Nasakom, mempertentangkan kaum Nasionalis dengan kaum Agama, kaum Agama dengan kaum Komunis, kaum Nasionalis dengan kaum Komunis". *(Resopim)*.

Kaum Komunis Indonesia menjatakan dengan tegas „siapa setudju Pantja Sila harus setudju Nasakom, dan sebaliknja siapa setudju Nasakom harus setudju Pantja Sila". (Laporan Politik kepada Sidang Pleno II CC PKI).

Makaitu kalau ada tindakan² jang berusaha memrétéli Pantja Sila se-enaknja sendiri, menurut selera sendiri², seperti perbuatan „orang jang ..... kepalanja sinting", untuk memindjam kata² Bung Karno, maka tindakan demikian adalah kontra-revolusioner dan harus ditentang dan ditindak!

Pengalaman menundjukkan, bahwa djika kita setia pada UUD 1945, termasuk djuga setia pada Pantja Sila, maka adjaran gotongrojong jang berporoskan Nasakom bisa dipertahankan, diperdjuangkan dan dilaksanakan. Tapi djika kita meninggalkan UUD 1945, dan mengchianati Pantja Sila termasuk mengchianati kegotongrojongan nasional jang berporoskan Nasakom, maka persatuan nasional bisa petjah dan dajadjuang Rakjat anti-imperialis dan anti-feodal untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Indonesia mendjadi dapat dipatahkan. Dalam sedjarah gerakan revolusioner hal ini dibuktikan oleh Peristiwa Madiun tahun 1948, jang ditjiptakan oleh kaum imperialis dan partai² pembantunja, ketika itu Masjumi dan PSI, jang didalangi oleh Hatta, Natsir, Sjahrir dan antek²nja jang telah lama meninggalkan UUD 1945, meninggalkan kegotongrojongan nasional, dan berusaha dengan melakukan pukulan² terhadap kaum Komunis dan gerakan revolusioner umumnja, untuk memudahkan kompromi. Sedangkan kaum nasionalis dan kaum agama jang djudjur tidak diuntungkan oleh Peristiwa Madiun

tersebut. Perlu saja tegaskan, bahwa djika seandainja ketika itu UUD 1945 berlaku sebagaimana mestinja, terutama sekali djika kekuasaan penuh ada dalam tangan Presiden Sukarno, Peristiwa Madiun tidak akan terdjadi.

Sedjak kita kembali ke UUD 1945 dalam tahun 1959 dan sedjak *Manipol* mendjadi Garis Besar Haluan Negara RI, maka terdapat dasar jang lebih kokoh bagi perkembangan persatuan nasional. PKI akan terus bergiat memperluas front persatuan nasional baik lewat Front Nasional, lewat kegiatan-kegiatan persatuan nasional berporoskan Nasakom, maupun lewat pengokohan persekutuan buruh dan tani, jaitu *basis* dari front persatuan nasional atau sebagaimana dikatakan Presiden Sukarno: sokoguru Revolusi Indonesia.

Kaum Komunisto-phobi sering sok-tahu dan memfitnah: bahwa kaum Komunis jang be-filsafat materialis tidak mungkin menerima Pantja Sila, karena sebagai materialis, kata mereka, tidak mungkin menerima sila Ketuhanan Jang Maha Esa.

Pertama: kaum Komunisto-phobi itu berusaha memrétéli Pantja Sila dengan hanja mengambil satu sila sadja, jaitu sila Ketuhanan Jang Maha Esa. Padahal kalau dibiarkan setiap golongan memrétéli Pantja Sila, ia bukan lagi alat pemersatu. Kaum Komunis menentang pemrétélan atau pemisahan sila² Pantja Sila. Pantja Sila harus diterima sebagai *kesatuan*, dan hanja djika demikian

ia tidak bisa lain daripada alat pemersatu. Mengingat sila Ketuhanan J.M.E. dalam Pantja Sila, kaum Komunis Indonesia setjara sukarela menerima ketentuan bahwa berdasarkan Pantja Sila tidak boleh dilakukan propaganda anti-agama di Indonesia. Difihak lain, berdasarkan 4 sila lainnja sudah selajaknja pula fihak kaum agama menerima ketentuan bahwa berdasarkan Pantja Sila di Indonesia tidak boleh dilakukan paksaan beragama.

Kedua: Kaum Komunis, jang berfilsafat materialis, berpandangan dunia jang bertitiktolak dari kenjataan objektif, tidak dari fikiran atau ide subjektif. Tidak bisa dimungkiri bahwa lima sila dari Pantja Sila itu mentjerminkan kenjataan² objektif, mentjakup kepentingan² semua golongan Rakjat Indonesia, seperti sila Ketuhanan Jang Maha Esa atau monotheisme, sila Perikemanusiaan atau Internasionalisme, sila Kebangsaan atau Nasionalisme/Patriotisme, sila Kerakjatan atau Demokrasi dan sila Keadilan Sosial atau Sosialisme. Dalam proses sedjarah gerakan nasional di Indonesia sila² ini mentjerminkan kenjataan objektif dan jang setjara keseluruhannja sebagai kesatuan harus diterima dan didjadikan *alat pemersatu* dalam perdjuangan revolusioner. Makaitu kaum Komunis jang berfilsafat materialis, jang bertitiktolak dari kenjataan² objektif, bisa menerima dan memperdjuangkannja dengan gigih sebagai alat pemersatu kekuatan² nasional jang revolusioner.

2) MENGENAI PEMBANGUNAN PKI

Berbitjara tentang pembangunan PKI tidak bisa terlepas dari kemadjuan² front persatuan nasional. Pembangunan Partai dan front persatuan nasional erat berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi kemadjuannja, lebih² setelah PKI mempunjai Konstitusi jang tepat sedjak tahun 1951 dan program jang tepat jang disahkan oleh Kongres Nasional V PKI tahun 1954 dan terus-menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan.

PKI telah berkembang dalam perdjuangan melaksanakan programnja jang konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal jang senantiasa disertai dengan gerakan², baik gerakan tentang perluasan anggota maupun gerakan pendidikan Marxisme-Leninisme dalam Partai. Salahsatu pengalaman penting dalam pembangunan PKI jalah pengalaman *bekerdja dengan Plan*, jang sedjak tahun 1951 telah mendjadi kebiasaan dalam tjarakerdja Partai. Pengalaman kami menundjukkan bahwa bekerdja dengan Plan bukan hanja mungkin, tapi djuga harus, bekerdja dengan Plan mendjauhkan kita dari tjarakerdja spontan dan mendjamin kesiapsediaan Partai melaksanakan tugas²nja. Plan mendjamin bahwa kita selalu melakukan pekerdjaan se-hari² dan membikin aktivitet Partai tidak mungkin terhenti oleh sebab² apapun. Pada waktu di-daerah² meletus pemberontakan kontra-revolusioner „PR-

RI-Permesta" dalam tahun 1958, banjak orang Komunis jang ditangkap dan dibunuh, seperti di Sumatera Barat, tapi organisasi PKI tidak patah, ia melakukan perlawanan jang gigih terhadap kaum pemberontak bersama dengan alat² negara dan meneruskan pembangunan Partai dengan ber-Plan.

PKI telah menjelesaikan dua kali Plan jang berdjangka pandjang, jaitu *Plan Tiga Tahun Pertama mengenai Organisasi dan Pendidikan* (1956 — 1959) dan *Plan Tiga Tahun Kedua mengenai Pendidikan dan Organisasi* (1960 — 1963). Pendidikan Partai telah dilakukan dari tingkat Central sampai keorganisasi-organisasi basis, sedangkan pendidikan itu digabungkan dengan tugas² Partai pada masa² tertentu serta dengan tugas² penelitian (research). PKI menekankan bahwa pembangunan organisasi adalah penting, tapi pembangunan ideologi adalah lebih penting lagi. Disemua tingkat Sekolah Partai diberi pendidikan tentang prinsip² fundamentil Marxisme-Leninisme terutama lewat matapeladjaran *Materialisme Dialektik dan Histori* (MDH) dan *Ekonomi Politik Marxis* (EPM) jang bertudjuan untuk membentuk dan memperkokoh pendirian, pandangan dan metode klas buruh, memperkuat ideologi klas buruh. Disamping MDH dan EPM, pada semua tingkat sekolah Partai diberi peladjaran tentang *Gerakan Buruh Internasional* (GBI) jang bertudjuan untuk mem-

pertebal pendidikan patriotisme revolusioner dan internasionalisme sosialis. Mata peladjaran jang paling pokok jalah tentang *Soal² Revolusi Indonesia* (SRI) jang sesuai dengan Manipol. Semua matapeladjaran adalah untuk membantu memahami setjara tepat Soal² Revolusi Indonesia, agar dapat dengan lebih baik lagi mengabdi pada Revolusi Indonesia. Hasil terbesar dari pembangunan Partai hingga kini jalah *kebulatan fikiran Marxisme-Leninisme* dikalangan kaum Komunis Indonesia. Kebulatan fikiran ini tidak hanja mengenai soal² Revolusi Indonesia, tetapi djuga mengenai semua politik dan kebidjaksanaan jang didjalankan oleh CC, mengenai soal² politik dalamnegeri dan soal² politik luarnegeri, termasuk soal² Gerakan Komunis Internasional.

PKI telah mendjadi Partai Marxis-Leninis jang beranggotakan lebih dari duasetengah djuta, dan merupakan Partai Komunis jang terbesar diluar kubu sosialis, Partai Komunis nomor tiga besarnja diseluruh dunia, salahsatu partai besar didalamnegeri, sudah tersebar diseluruh negeri serta terkonsolidasi dibidang politik, organisasi dan ideologi. Pada umumnja para anggota PKI kini telah terdidik dalam pandangan, pendirian, metode dan semangat Marxis-Leninis. Dengan pimpinan kaum Komunis Indonesia telah diorganisasi lebih dari 3½ djuta kaum buruh dalam serikatburuh² revolusioner dan lebih dari 7 djuta kaum tani didalam

organisasi massa tani revolusioner (BTI).

Dengan demikian pada pokoknja PKI telah berhasil meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme jang pada hakekatnja mengintegrasikan PKI jang Marxis-Leninis dengan kaum tani. Sedjak 17 Agustus 1963 PKI sedang melaksanakan *Plan Empat Tahun mengenai Kebudajaan, Ideologi dan Organisasi*, jang mentjakup tugas² jang mendesak di-bidang² tsb. bagi pembangunan Partai dan tentu akan memberi pengaruh jang besar bagi kemadjuan gerakan revolusioner di Indonesia.

Demikianlah dengan singkat tentang soal² pembangunan PKI, jang sesuai dengan permintaan Sdr²., dengan segala senang hati telah saja uraikan. Djika ingin tahu lebih banjak tentang pembangunan PKI, para Sdr. saja persilahkan mempeladjari dokumen² PKI. Djika dibanding dengan partai politik lain, PKI adalah Partai jang paling banjak mengeluarkan dokumen jang menerangkan kehidupan internnja. Ini tidak bisa lain, karena PKI disamping Partai kader, adalah Partai massa, oleh karena itu segalasesuatu harus tjepat diketahui oleh massa anggota jang luas dengan djalan mengumumkannja.

II. TENTANG SOAL² REVOLUSI INDONESIA

Revolusi Agustus 1945, meskipun merupakan revolusi jang tuntutan²nja belum selesai, telah memberi peladjaran² penting kepada Rakjat Indonesia. Ia telah menundjukkan bahwa adalah sangat penting bagi kita untuk mengenal baik sifat masjarakat Indonesia agar mengenal baik pula soal² pokok revolusi Indonesia, jaitu sasaran² revolusi, tugas² revolusi, kekuatan² revolusi dan kekuatan² pendorong revolusi, sifat revolusi dan perspektif atau haridepan revolusi Indonesia. Begitu banjak peladjaran jang diberikannja. Sungguh benarlah utjapan Lenin, bahwa „setiap bulan dari masa sedemikian adalah sama dengan seluruh tahun perkembangan 'damai', 'konstitusionil'."

Revolusi Agustus '45 djuga memberi petundjuk tentang mutlak perlunja front persatuan nasional jang berbasiskan persekutuan buruh dan tani dan jang dipelopori oleh klas buruh, tentang mutlak perlunja Partai Marxis-Leninis, jaitu PKI, jang erat berhubungan dengan massa, tersebar diseluruh negeri dan terkonsolidasi dilapangan organisasi, politik dan ideologi, dan bahwa dalam revolusi perdjuangan bersendjata Rakjat adalah bentuk perdjuangan jang terpenting dalam mengalahkan imperialisme dan kaum kontra-revolusioner.

Salahsatu peladjaran jang terpenting dari revolusi Agustus jalah bahwa djika revolusi nasional dan demokratis di Indonesia hendak mentjapai kemenangan, maka PKI harus mampu memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, *PKI harus*

meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme. Proses meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme sudah berdjalan sedjak PKI berdiri (1920), dan bahkan sedjak ISDV (1914), tetapi pemahkotaannja baru dalam tahun 1954 (Kongres Nasional ke-V PKI) dan proses ini masih berdjalan terus.

Dengan meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme, klas buruh dan Rakjat pekerdja Indonesia mendapat sendjata ampuh ditangan dalam perdjuangannja untuk Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis melawan imperialisme dan sisa² feodalisme sebagai landasan untuk menudju ke Sosialisme.

Dalam bukunja *„The National-Liberation Movement in the East"*, W.I. Lenin djuga pernah menekankan dihadapan para Komunis negeri² Timur, bahwa mereka dengan bersandarkan teori dan praktek umum Komunisme „harus menjesuaikan diri pada sjarat² chusus jang tidak ada di-negeri² Eropa dan harus tjakap mentrapkan teori dan praktek itu pada sjarat² dimana djumlah jang sangat terbanjak dari penduduk adalah kaum tani". Kaum Komunis di-negeri² Timur, demikian Lenin selandjutnja, harus „menterdjemahkan adjaran Komunis jang sedjati ..... kedalam bahasa tiap² Rakjat". Ini tidak mempunjai arti-lain, ketjuali bahwa kaum Komunis Indonesia harus meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme.

1) TENTANG SIFAT MASJARAKAT INDONESIA DAN SOAL² POKOK REVOLUSI INDONESIA

Memahami sifat masjarakat Indonesia berarti memahami kenjataan² objektif mengenai susunan ekonomi, politik dan kebudajaan negeri kita. Meskipun Republik Indonesia sudah berumur hampir 19 tahun, ada Kabinet Kerdja susunan baru, ada MPRS dan DPRGR jang berporoskan serta dengan pimpinan Nasakom, ada Angkatan Bersendjata jang anti-imperialis, kita serantiasa bisa mempersoalkan apakah dalam *politik* RI sudah sepenuhnja berdaulat, apakah dalam *ekonomi* RI sudah sepenuhnja berdiri diatas kaki sendiri, apakah dalam *kebudajaan* RI sudah sepenuhnja berkepribadian nasional.

Tidak bisa dibantah bahwa kenjataan² dibidang ekonomi di Indonesia menundjukkan bahwa kaum imperialis terutama imperialis Amerika Serikat, masih bertjokol ditanahair kita, masih menguasai kehidupan ekonomi kita, terutama dibidang perminjakan. Dengan mentjengkramnja kapital monopoli AS dalam bentuk lama, terutama dibidang perminjakan, maupun dalam bentuk baru seperti pensalahgunaan prinsip² „production sharing", terselenggaranja „joint venture" dsb., mereka menguras kekajaan alam kita, memeras tenaga kerdja Rakjat kita dan mempertahankan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar bagi barang dagangan imperialis, jang kesemuanja ini

menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan membikin ekonomi Indonesia mendjadi sangat tergantung pada sistim dunia kapitalis. Pada tahun 1952 penanaman modal AS ditaksir berdjumlah $ 350 djuta. Kemudian ditambah dengan penanaman modal AS di-perusahaan² minjak bumi (meliputi Shell, Stanvac, Caltex) tak kurang dari $ 171 djuta, dan apa jang disebut „bantuan ekonomi" AS sedjumlah $ 639 djuta (keterangan dutabesar AS, H. Jones), merupakan bentuk neo-kolonialisme AS dibidang ekonomi. Selandjutnja sekarang sudah diketahui umum bahwa peraturan² „26 Mei 1963", jang bertentangan dan bahkan terang²an mensabot Dekon, sebagai akibat politik reaksioner dari unsur² anti-Rakjat dalam Kabinet Kerdja susunan lama, akibat politik tunduk pada „program stabilisasi ekonomi" a'la Amerika Serikat, menurut keterangan WPM I Dr. Subandrio dimuka DPRGR pada tgl. 11 Desember 1963, telah „dikeluarkan dengan harapan akan bantuan dari luarnegeri beberapa ratus djuta dollar". Disamping itu kekurangadjaran kaum imperialis AS untuk terus mengqerowoti ekonomi Indonesia dan mengantjam kedaulatan RI, a.l. dengan memasukkan Armada ke-VII AS kedaerah perairan Samudera Indonesia, dan tjampurtangan imperialis AS dalam perdjuangan Indonesia mengganjang „Malaysia", membenarkan pendirian kita, bahwa imperialis AS telah menggantikan imperialis Belanda sebagai

musuh nomor satu dan paling berbahaja dari Rakjat Indonesia.

Disamping imperialisme jang mengangkangi kehidupan ekonomi Indonesia berlangsung pula kegiatan kaum kapitalis birokrat dan burdjuasi komprador jang langsung merusak ekonomi sektor negara dan sektor swasta nasional patriotik. Merekalah OKB² (Orang² Kaja Baru) dan OKM² (Orang² Kaja Mendadak) jang tampil sebagai penghisap² besar di-kota² dengan agen² dan kakitangan-kakitangannja di-desa².

Sedangkan kenjataan di-desa² menundjukkan bahwa hubungan agraris disamping pengaruh imperialis jang menguasai perkebunan (karet, tembakau, kopi, kopra, dsb.) masih terdapat hubungan-hubungan ekonomi jang bersifat feodal, dan kaum tani, terutama kaum buruhtani dan tanim'skin, hidupnja dalam keadaan melarat dan tergantung pada tuantanah feodal. Kenjataan ini disebabkan berhubung dengan masih adanja hak monopoli tuantanah atas milik tanah jang dikerdjakan kaum tani jang tak bertanah, pembajaran sewatanah dalam udjud barang hasil panen kepada tuantanah, adanja sistim sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuantanah dan adanja tumpukan hutang jang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah dan terhadap lintah darat. Djadi, sisa² feodalisme tidak identik dengan sisa² kaum ningrat, seperti jang

sering disalahartikan. Penghisapan setjara feodal bisa dilakukan, dan dilakukan dengan ganas, oleh seseorang tuantanah jang setetespun tidak mempunjai „darah ningrat".

Meskipun aksi massa revolusioner kaum tani dan perdjuangan kaum revolusioner dalam DPRGR telah menghasilkan UUPA dan UUPBH, namun pelaksanaan undang² tsb. mengalami banjak sabotase dan realisasinja sangat lambat atau matjet samasekali. Sebenarnja UUPA baru *membatasi* dan belum sampai menghapuskan sistim tuantanah dan penghisapan feodal di-desa².

Kenjataan-kenjataan di-bidang² ekonomi tsb. djuga tertjermin dibidang politik dan kebudajaan. Tidak bisa dibantah bahwa kaum imperialis dengan keras berusaha untuk tjampurtangan dalam urusan politik, seperti dalam politik konfrontasi dengan „Malaysia", dalam pembebasan Irian Barat, dalam penjelenggaraan Asian Games dan Ganefo, dalam politik pembangunan dsb., dsb. Disamping itu djelas, bahwa pengaruh kaum imperialis dan kaum feodal dibidang kebudajaan masih tjukup besar di Indonesia, seperti terbukti dari persentase jang tinggi (sampai 90%) dari pemutaran film² AS di Indonesia, beredarnja penerbitan-penerbitan dan lagu² jang membawa pandangan, pendirian dan selera imperialis, dsb., dsb.

Berdasarkan kenjataan² tsb. dapat diambil kesimpulan bahwa sifat masjarakat Indonesia masih

belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal. Kata² „belum merdeka penuh" menundjukkan bahwa disatu fihak Indonesia bukan negeri jang tidak merdeka, tetapi difihak lain menundjukkan bahwa Rakjat Indonesia masih harus berdjuang untuk merebut kemerdekaan jang penuh baik dilapangan ekonomi, politik maupun kebudajaan, untuk penjelesaian revolusi nasional dan demokratis.

Dengan demikian mendjadi djelaslah tentang soal² pokok revolusi Indonesia sbb.: tentang *sasaran revolusi*, jaitu imperialisme dan feodalisme beserta pembantu²nja kaum kapitalis komprador dan kaum kapitalis birokrat, sedang musuh nomor satu revolusi jalah imperialisme AS jang djuga merupakan musuh Rakjat² sedunia; tentang *tugas revolusi*, jaitu melawan dengan gigih dan menumbangkan kekuasaan imperialisme dan feodalisme untuk mendirikan kekuasaan Rakjat; tentang *kekuatan revolusi*, jaitu semua golongan Rakjat jang dirugikan imperialisme dan feodalisme, jaitu klas buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional; tentang *kekuatan pendorong revolusi*, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil jang konsekwen melawan imperialisme dan feodalisme; tentang *sifat revolusi*, jaitu revolusi nasional dan demokratis, sebagai tahap pertama revolusi Indonesia; dan tentang *perspektif revolusi* Indonesia, jaitu Sosialisme, sebagai realisasi tahap kedua revolusi Indonesia.

Mengenal soal² pokok revolusi Indonesia dengan sederhana dapat dirumuskan: 1, 1, 2, 3, 4, atau do, do, re, mi, fa, jaitu: 1 jang pertama = satu kekuatan peloper, jaitu klas buruh; 1 jang kedua = satu kekuatan pokok revolusi, jaitu kaum tani; 2 = dua kekuatan jang mendjadi basis front persatuan nasional, jaitu klas buruh dan kaum tani; 3 = tiga kekuatan pendorong revolusi, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil; 4 = empat kekuatan revolusioner front nasional, jaitu klas buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional.

2) TENTANG MANIPOL DAN PROGRAM PKI

Manifesto Politik RI atau Manipol, jaitu Pidato Presiden Sukarno pada tgl. 17 Agustus 1959, dengan perintjiannja oleh DPA beserta pedoman² pelaksanaannja, seperti pidato² Djarek, Resopim, Takem, Dekon, dll., telah disahkan sebagai Garis Besar Haluan Negara RI oleh Sidang pertama MPRS.

Manipol haruslah diartikan keseluruhannja, jang djika diringkas tertjakup dalam „9 Wedjangan" Bung Karno mengenai: 1) Revolusi; 2) Pantja Sila dan Progresivisme; 3) Kepribadian Indonesia — jang berpusat kepada gotongrojong, musjawarah dan mufakat; 4) Persatuan nasional revolusioner; 5) Memberantas Komunisto-phobi; 6) Mutlak-perlunja poros Nasakom; 7) Djahatnja liberalisme; 8) Perlunja satu pimpinan nasional; dan

9) Sosialisme. Sembilan wedjangan ini adalah perasa i daripada semua bahan pokok indoktrinasi dan harus mendjadi milik bersama Rakjat Indonesia, termasuk milik Angkatan Bersendjata.

Disamping program pemerintah dan program angkatan bersendjata, Manipol djuga program partai², ormas² dan perseorangan, pendeknja program dari front nasional. Tiap partai dan ormas mempunjai programnja sendiri, tapi semua harus melaksanakan program bersama, Manipol.

Selandjutnja Manipol djuga meneqaskan sifat dan program revolusi Indonesia, jang terdiri dari 2 tahap jaitu „*pertama*, tahap mentjapai Indonesia jang merdeka penuh, bersih dari imperialisme dan sisa² feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan, *kedua*, tahap mentjapai Indonesia ber-sosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari exploitation de l'homme par l'homme. Tahap ini hanja bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnja". („Djarek", dalam *Tubapi* halaman 171-172).

Dari uraian tsb. djelaslah bahwa Manipol jang lahir pada tahun 1959, 5 tahun jl., lahir dari kantjah perdjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme dan feodalisme. Program PKI jang telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V tahun 1954, sepuluh tahun jang lalu, dan disempurnakan dalam Kongres Nasional ke-VI dan ke-VII adalah program jang konsekwen anti-imperialis

dan anti-feodal. Karena itu ada hubungan jang sangat erat antara Manipol dengan program PKI. Pangkal persamaan jalah mengenai strategi umum revolusi Indonesia. Baik program PKI maupun Manipol mengakui adanja 2 tingkat atau 2 tahap revolusi Indonesia, tahap revolusi nasional-demokratis dan tahap revolusi sosialis.

Makaitu kaum Komunis Indonesia mengatakan bahwa melaksanakan Manipol setjara konsekwen adalah sama halnja dengan melaksanakan program PKI, kaum Komunis Indonesia harus senantiasa konsekwen dan mendjadi teladan dalam melaksanakan Manipol. Hanja kaum Manipolis-munafik dan kaum reaksioner jang berusaha menghambat dan mensabot Manipol. Tidak bisa dibantah, bahwa semakin baik pelaksanaan program PKI, semakin lantjar pelaksanaan Manipol, dan semakin konsekwen Manipol dilaksanakan, semakin lantjar pelaksanaan program PKI.

Tetapi antara program PKI dengan Manipol djuga ada perbedaannja. Manipol adalah program bersama dari Rakjat untuk penjelesaian revolusi Indonesia, program Front Nasional, sedangkan program PKI adalah program klas buruh untuk penjelesaian revolusi Indonesia pada tingkat sekarang. Perbedaan terpentinq jalah dalam hal *pimpinan revolusi*. Program PKI menundjukkan dengan tegas bahwa pimpinan revolusi harus berada ditangan klas buruh bila ingin mentjapai tudjuan-

nja. Tentu tidak dapat diharapkan adanja perumusan demikian dalam Manipol. Tentang ini kaum Komunis dapat memahami sepenuhnja.

Tetapi, walaupun demikian, dalam Manipol dinjatakan perlunja ada satu *pimpinan nasional* jang berdjiwa Manipol, dan bahwa kaum buruh dan kaum tani adalah sokoguru revolusi. Ada orang jang menuduh, se-olah² PKI tidak mengakui adanja satu pimpinan nasional dengan mengadjukan „pimpinan klas buruh". PKI sebagai partai klas buruh tentu mengadjukan „pimpinan klas buruh". jaitu pimpinan ideologi klas buruh, ideologi revolusioner anti penghisapan atas manusia oleh manusia. Sedangkan jang diartikan pimpinan nasional jalah pimpinan jang berdjiwa Manipol. Karena pelaksanaan Manipol setjara konsekwen adalah sama halnja dengan pelaksanaan program PKI, maka pengadjuan masalah pimpinan klas buruh tidaklah bertentangan dengan penerimaan PKI terhadap perlunja ada satu pimpinan nasional dan pimpinan Bung Karno jang Manipolis.

Demikianlah keterangannja, mengapa kaum Komunis Indonesia dalam melaksanakan program Manipol harus berdiri dibarisan depan dan sungguh-sungguh bertekad untuk mendjadi teladan.

3) TENTANG PKI DAN PROGRAM KABINET KERDJA

Mendjelaskan tema ini sekaligus berarti setjara singkat mengutarakan taktik² PKI sekarang, baik

dalam menghadapi politik dalamnegeri maupun politik luarnegeri Pemerintah RI.

Dalam Sidang Pleno II CC PKI achir tahun jang lalu sikap PKI sudah dikemukakan se-terang²-nja menjokong triprogram kabinet kerdja gaja baru: a) *Sandangpangan;* b) *pengganjangan „Malaysia"*, dan c) *meneruskan pembangunan.*

a). PKI sudah lama berpendirian bahwa untuk memetjahkan masalah sandangpangan, kita harus djuga berdiri diatas kaki sendiri, dengan per-tama² melaksanakan landreform jang radikal, jaitu mendjalankan program agraria PKI, jaitu pensitaan tanah tuantanah, pembagian tanah sitaan dengan tjuma² kepada kaum tani penggarap dan anggota keluarganja seorang² sebagai milik perseorangan. Dengan demikian tenaga produktif didesa bisa dibebaskan, dan produksi bisa ditingkatkan. Tapi program agraria PKI sekarang belum bisa diterima oleh burdjuasi nasional. Karena itu dilahirkanlah UUPBH (Undang² Perdjandjian Bagi Hasil) dan UUPA (Undang² Pokok Agraria), jaitu undang² jang membatasi milik tanah tuantanah. Tapi pelaksanaan kedua Undang² ini sangat lambat dan matjet. Fihak resmi menjatakan bahwa berdasarkan UUPA sebanjak 1 djuta ha harus dibagikan. Tapi jang terdaftar baru kira² seperlima, dan dari jang seperlima baru 9% jang dibagikan, dan dari jang 9% ini lebih dari separoh djatuh ketangan jang tak berhak. Demikian pula keadaannja dengan

pelaksanaan UUPBH. Makaitu adalah adil apabila kaum tani melaksanakan gerakan aksi-sefihak, jaitu melaksanakan UUPBH dan UUPA tanpa menunggu-nunggu kesediaan tuantanah jang terus-menerus mensabot pelaksanaan kedua undang² tsb. PKI berpendirian bahwa pelaksanaan UUPBH dan UUPA setjara konsekwen adalah tindakan revolusioner jang menguntungkan pemerintah, tidak hanja dapat mempertjepat pelaksanaan undang-undang jang semestinja di Djawa sudah selesai dalam tahun 1963, tapi djuga memberi dasar kepada pemerintah untuk dapat mensukseskan program sandangpangan Kabinet Kerdja.

Dalam pada itu PKI menjokong tuntutan kaum tani sbb.: 1) *Panitia Landreform* supaja berporoskan Nasakom, 2) *Rituling Personalia Djawatan Agraria;* 3) *Pengadilan Landreform* supaja dibentuk dengan ikutsertanja kaum tani.

b). Dalam melaksanakan program *pengganjangan "Malaysia"* PKI berpegang teguh pada pendirian bahwa mengganjang „Malaysia" adalah „a matter of principle" dan bahwa konfrontasi total dengan „Malaysia" meneguhkan kedaulatan R.I. menghantjurkan intervensi neo-kolonialisme Inggris jang disokong oleh imperialisme AS.

PKI menentang pendirian reformis dalam menghadapi „Malaysia", jang buru² bersikap sedia mengakui apa jang dinamakan „Malaysia". Mereka berdalih se-olah² kalau terus berkonfrontasi

dengan „Malaysia" Indonesia akan ambruk karena kesulitan² ekonomi dalamnegeri.

PKI djuga menentang pendirian avonturis dalam menghadapi „Malaysia", jaitu pendirian kaum Bonapartis jang mau buru² menjerbu daerah Kalimantan Utara untuk mengobarkan peperangan didaerah ini dan siap² keluar sebagai pemenang dan pembebas Kalimantan Utara. Perdjuangan kemerdekaan Rakjat Kalimantan Utara tidak tergantung terutama pada bantuan Indonesia, tapi terutama tergantung pada Rakjat Kalimantan Utara sendiri.

PKI berpendirian bahwa perdjuangan mengganjang „Malaysia" harus dilaksanakan terus *setjara re. olusioner* dan dengan penuh kejakinan bahwa Indonesia tidak akan ambruk karena kesulitan ekonomi, tapi Indonesia akan keluar dari konfrontasi dengan kemenangan, djika kita :

1. terus mengkonsolidasi front anti-„Malaysia" didalamnegeri dengan djalan setjara konsekwen melakukan perdjuangan anti-imperialis dan anti-feodal, melaksanakan landreform, meneruskan pengambilalihan perusahaan² Inggris, memperkuat ekonomi negeri, melawan neo-kolonialisme disemua bidang ekonomi dan melaksanakan kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom disegala bidang.

2. terus memperkuat front anti-„Malaysia" didaerah Malaja, Singapura dan Kalimantan Utara, mengakui Pemerintah NKKU dibawah pimpinan Perdana Menteri Azahari dan membantu perdjuangan sukarelawan² melawan kekuasaan neo-kolonialisme „Malaysia".

3. terus menggalang front internasional anti-„Malaysia" dengan menarik kekuatan² NEFO lainnja mengganjang „Malaysia", dengan terus meningkatkan solidaritet internasional membantu Rakjat Kalimantan Utara dan memboikot „Malaysia". Hal ini bisa dikembangkan antara lain dengan melaksanakan Konferensi Bandung ke-II.

Dari uraian diatas djelaslah bahwa perdjuangan mengganjang „Malaysia" tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan program sandangpangan dan program pembangunan.

PKI menjambut hangat seruan Presiden Sukarno kemarin (16-III-64) untuk mengadakan gerakan sukarelawan guna mengganjang lebih hebat „Malaysia". Dalam tjeramah saja dihadapan Universitas Indonesia semalam, saja djuga telah menjerukan agar pemuda² dan mahasiswa² berdujun-dujun mendaftarkan diri sebagai sukarelawan.

c). Dalam menghadapi program meneruskan pembangunan, PKI berpendapat bahwa kuntjinja terletak djuga pada pelaksanaan landreform, pada pembebasan tenaga produktif di-desa², sehingga dapat mensukseskan tidak hanja dalam pelaksanaan program sandangpangan, tapi djuga dalam

pembangunan. Dalam hubungan dengan ini djuga penting masalah penetapan titikberat pembangunan, jaitu mengutamakan pembangunan dibidang jang vital, jang langsung dapat memberi sumbangan pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, pendeknja pada pelaksanaan *Dekon* setjara konsekwen. Menaikkan produksi adalah keharusan, dan ini hanja mungkin djika „setjara *prinsip* mengembangkan tenaga produktif daripada buruh dan tani" *(Gesuri)*.

Sjarat utama untuk melaksanakan pembangunan jalah mengachiri penjelewengan „26 Mei 1963", menggantinja dengan peraturan² ekonomi jang sesuai dengan *Dekon*, sesuai dengan tugas revolusi nasional dan demokratis sekarang ini. Hanjalah dengan teguh² berdiri diatas kaki sendiri, maka barulah Indonesia dapat setapak demi setapak menggerowoti ekonomi kolonial jang masih bertjokol di Indonesia, dan melepaskan diri dari berbagai bentuk neo-kolonialisme dibidang ekonomi. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan sukses apabila dengan segera dilakukan keputusan² PB Front Nasional 5 September 1963 mengenai perubahan peraturan² ekonomi 26 Mei 1963, rituling aparatur negara, terutama sekali membentuk Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom bukan suatu wasiat, akan tetapi pasti lebih baik daripada jang tidak gotongrojong dan tidak Nasakom, se-kurang²nja ia membuka kemungkinan² jang lebih baik bagi penjelesaian masalah² dalam-negeri maupun internasional.

4) TENTANG PKI DAN ANGKATAN BERSENDJATA R.I. CHUSUSNJA AURI

Seperti sudah saja sebut pada permulaan tjeramah ini, antara PKI dan Angkatan Bersendjata sudah terdapat tradisi persatuan jang lama, dan jang senantiasa terus dipelihara, dipupuk dan dikembangkan.

Memang masih ada djuga sementara orang jang merupakan kekuatan gelap, jang masih hidup dalam alam fikiran bahwa PKI dengan alat² negara chususnja Angkatan Bersendjata, harus bentrokan. Djika menggunakan kata² Presiden Sukarno, mereka sebenarnja „orang² jang otak dan hatinja telah berdaki-berkarat tak dapat menjesuaikan diri dengan Manipol-Usdek". (*Tubapi*, hal. 211). Tidak bisa disangkal, bahwa adanja orang² revolusioner dalam Angkatan Bersendjata, baik AURI maupun Angkatan² lain adalah sangat membantu PKI dalam mengubah pandangan Rakjat terhadap Angkatan Bersendjata, dan djuga untuk mengubah pandangan Angkatan Bersendjata terhadap gerakan revolusioner, termasuk PKI.

Untuk memahami watak Angkatan Bersendjata RI adalah sangat penting menjedari, bahwa *kekuasaan politik Indonesia atau kekuasaan RI mempunjai 2 aspek, jaitu aspek pro-Rakjat jang*

mewakili kepentingan² Rakjat dan aspek anti-Rakjat jang mewakili kepentingan² musuh² Rakjat.

Kenjataan² menundjukkan bahwa dalam kekuasaan negara RI tidak hanja ada kaum komprador, kaum kapitalis birokrat, kaum tuantanah, tapi djuga ada orang² jang pro-Rakjat, jang disokong kaum buruh, kaum tani, inteligensia revolusioner dan elemen² demokratis lainnja.

Aspek pro-Rakjat telah menempati kedudukan memimpin dalam kontradiksi itu pada waktu sekarang. Hal ini dibuktikan oleh semakin banjaknja politik revolusioner jang disahkan oleh kekuasaan negara R.I. seperti Manipol, Dekon, Ganjang Malaysia, Nefo kontra Oldefo, UUPA, UUPBH, dsb. Aspek anti-Rakjat sudah merupakan aspek jang tidakpokok, tapi aspek ini masih menempati kedudukan ber-dominasi dan masih bisa mentjelakakan Rakjat. Hal ini dibuktikan oleh kenjataan masih adanja politik jang reaksioner jang didjalankan atasnama negara, seperti misalnja „Sob tanpa Sob", Peraturan² „26 Mei 1963" atau penggantinja jang sama djeleknja, instruksi pelarangan ambilalih perusahaan² Inggris, matjam² perundang²an jang melindungi kepentingan² imperialis dan tuantanah, dsb. Makaitu pula sering kita semua mendengar seruan Bung Karno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi supaja Rakjat membantu beliau mengganjang dan meritul mereka jang anti-Nasakom, jaitu elemen² anti-Rakjat jang

masih berperanan dalam kekuasaan politik sehingga merupakan perintang besar bagi pembentukan Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Tanpa memahami adanja dua aspek dari kekuasaan politik dinegeri kita sulitlah untuk benar² memahami berbagai peristiwa di Indonesia dewasa ini, sehingga mudah terdjerumus pada hanja menilai kulit belaka dan tidak menilai isi (hakekat) peristiwa² jang terdjadi.

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, termasuk AURI, sebagai alat negara jang dilahirkan oleh revolusi Agustus 1945 mempunjai tjiri² seperti jang pernah saja sebutkan dalam tjeramah SESKOAD, sbb.: 1) anti-fasis, demokratis, anti-imperialis dan ber-tjita² Sosialisme Indonesia, alat untuk mengabdi pada penjelesaian Revolusi Indonesia; 2) alat untuk mengabdi pada perdjuangan besar NEFO kontra OLDEFO; 3) alat pembela keutuhan wilajah dan kesatuan nasion Indonesia.

Mengingat akan kechususan kedudukan geografis Indonesia, AURI merupakan potensi jang sangat penting untuk bersama Rakjat setjara sedar mendorong dan memperkuat *aspek pro-Rakjat* daripada kekuasaan politik sekarang dan *mengganjang aspek anti-Rakjat*, mengganjang mereka jang Nasakom-phobi, jang Komunisto-phobi, dan jang membela kepentingan imperialis dan tuantanah. Dalam perdjuangan ini AURI telah memainkan peranan penting dan saja jakin, bahwa harapan Rakjat tidak akan sia², jaitu agar AURI

tetap setia pada Rakjat dan Revolusi Indonesia.

5) TENTANG PKI DAN TUGAS² INTERNASIONAL REVOLUSI INDONESIA

Revolusi Indonesia merupakan bagian jang takterpisahkan dari revolusi dunia, jaitu revolusi sosialis dunia. Tiga kerangka Manipol jang mendjadi program pemerintah dan Rakjat Indonesia menundjukkan hubungan antara revolusi Indonesia dengan gerakan revolusioner Rakjat² semua negeri untuk membentuk satu dunia baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme.

Tugas internasional Revolusi Indonesia sekarang pada hakekatnja jalah memperkuat front internasional anti-imperialis, jaitu KBST (kekuatan baru jang sedang tumbuh) untuk melawan KLMB (kekuatan lama jang masih bertjokol). Gerakan revolusioner Rakjat Indonesia dapat menunaikan tugas ini, apabila ia mengintegrasikan diri dengan revolusi-revolusi Rakjat² semua negeri, jang anti-imperialis, anti-kolonial dan anti-neo-kolonial. Tidak bisa disangkal bahwa pengintegrasian revolusi Indonesia dengan revolusi dunia sangat tergantung pada sikap PKI terhadap gerakan revolusioner sedunia dan chususnja terhadap GKI (Gerakan Komunis Internasional).

Didunia dewasa ini terdapat *kontradiksi² dasar* sbb. : 1) antara kubu sosialis dengan kubu imperialis, 2) antara klas proletar dengan klas burdjuis di-negeri² kapitalis, 3) antara nasion² tertindas dengan imperialisme, 4) antara imperialisme dengan imperialisme. Kontradiksi dasar itu mentjirii dunia dewasa ini. Diantara kontradiksi² tsb., dua merupakan *kontradiksi pokok*, jaitu kontradiksi-kontradiksi jang dewasa ini mempunjai peranan memimpin kontradiksi lainnja, adalah 1) dan 3). Tetapi pada dewasa ini, diantara kontradiksi² itu jang merupakan *kontradiksi terpokok*, kontradiksi jang tidak hanja memimpin kontradiksi² lainnja tapi djuga menuntut penjelesaiannja jang segera, jaitu: *Kontradiksi antara nasion² tertindas dengan imperialisme*. Negeri² Asia, Afrika dan Amerika Latin membuktikan dengan tegas bahwa kontradiksi antara nasion² tertindas dengan imperialisme, jang dikepalai oleh imperialis AS, terus menghebat. Di-benua² itulah kaum imperialis mendapat pukulan² jang semakin keras dan disitulah pula terdapat *situasi revolusioner* jang terus menandjak dan mematang.

Asia Tenggara merupakan salahsatu titikpusat didaerah kontradiksi terpokok. Situasi revolusioner di Asia Tenggara djuga terus menandjak dan mematang dan perdjuangan melawan imperialisme, dengan menggunakan berbagai matjam bentuk, termasuk perdjuangan bersendjata, tidak pernah berhenti di Asia Tenggara. Misalnja sekarang perdjuangan Rakjat Indonesia mengganjang „Malaysia", telah memberi sumbangan pula dalam perdjuangan anti-imperialisme di Asia Tenggara,

sebagaimana halnja perdjuangan Rakjat Vietnam Selatan melawan imperialisme AS.

Dalam perdjuangan melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme itu tidak bisa kita bersikap atjuh-tak-atjuh terhadap revisionisme modern, jang merupakan ratjun untuk melumpuhkan perdjuangan revolusioner anti-imperialis. Pengalaman² kaum revisionis modern Jugoslavia misalnja, tjukup dikenal umum di Indonesia. Dalam kasak-kusuknja mereka menjebar-njebarkan pandangan garis djalan-tengah atau garis non-blok jang membikin kabur perdjuangan anti-imperialis, jang bertentangan dengan garis NEFO kontra OLDEFO. Kaum revisionis dan kakitangan imperialis lainnja menjebar-njebarkan pandangan humanisme universil dikalangan tokoh² Indonesia, terutama dikalangan inteligensia dan seniman, untuk mengendorkan semangat perdjuangan revolusioner. Kaum revisionis Jugoslavia malahan sampai tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri Republik Indonesia, menentang gagasan NASAKOM dengan menuntut supaja Pemerintah RI mengambil tindakan terhadap PKI jang dengan gigih menelandjangi revisionisme modern.

Revisionisme modern pada hakekatnja adalah perwudjudan ideologi burdjuis jang tumbuh dalam gerakan klas buruh internasional dewasa ini, jang mengchianati perdjuangan revolusioner klas buruh dan meninggalkan adjaran revolusioner Marxisme-

Leninisme. Pada hakekatnja revisionisme modern ingin merevisi tekad revolusioner Rakjat, ingin merevisi djalan revolusioner dan menggantikannja dengan djalan evolusioner, reformisme dan bahkan kontra-revolusioner.

Makaitu perdjuangan melawan revisionisme modern bukanlah soal kaum Komunis Indonesia semata², tetapi soal semua orang revolusioner. Dan perdjuangan melawan revisionisme djuga bukan hanja soal kaum Komunis sedunia sadja, tetapi djuga soal seluruh kekuatan baru jang sedang tumbuh, jang melawan imperialisme.

Menurut pengalaman Rakjat Indonesia, seperti halnja dalam GANEFO jl, djika kaum revisionis itu dilawan dengan keras mereka pasti mundur dan perdjuangan anti-imperialis bisa kokoh. Tapi djika tidak dilawan, perdjuangan anti-imperialisme mendjadi tidak berdaja dan kaum imperialis mendjadi makin ganas. Hal ini djuga dibuktikan oleh perdjuangan Rakjat negeri lain jang anti-imperialis dalam menghadapi kasak-kusuk kaum revisionis modern.

Mengenai perbedaan² pendapat dalam Gerakan Komunis Internasional (GKI), seperti jang sudah diketahui umum, PKI berpendirian untuk tetap mempertahankan *azas kebebasan dan haksama*. Sikap ini bukan sikap netral, tapi sikap jang mendjundjung tinggi Marxisme-Leninisme dan melawan revisionisme, baik jang klasik maupun jang

modern. PKI djuga menentang dogmatisme baik jang klasik maupun jang modern. Sikap jang mempertahankan azas *kebebasan dan haksama* sering dituduh oleh kaum revisionis sebagai sovinis, jang terang tidak beralasan. Sebaliknja kaum reaksioner dalamnegeri djustru mendesak-desak supaja kami melepaskan azas kebebasan dan haksama, makudnja supaja kami mengekor kaum revisionis dan berdjalan seiring dengan kaum imperialis.

Kaum Komunis Indonesia suka difitnah sebagai „agen Moskow", „agen Peking", dan djuga „agen Moskow dan Peking", dsb. Semuanja ini adalah lagu lama dan sudah mulai dibungkam oleh fakta² dan bukti² njata dalam usaha² PKI jang berhasil meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme, mengabdi diri lebih banjak kepada revolusi Indonesia dan kepada internasionalisme proletar. Keadaan ini pula jang membikin PKI tetap segar dalam perdjuangan untuk seleksi, kristalisasi dan konsolidasi dalam Gerakan Komunis Internasional.

Dari seluruh uraian diatas djelaslah, bahwa perdjuangan melawan imperialisme dan feodalisme serta revisionisme modern bukanlah se-mata² tugas kaum Komunis Indonesia, tapi tugas setiap patriot Indonesia. Perdjuangan ini merupakan bagian² terpenting daripada perdjuangan Rakjat Indonesia untuk membikin Indonesia benar² *berdaulat dalam politik, berdiri diatas kaki sendiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudajaan.*

SIP No. 440/JL/1964 — 10.000
P.I.R. 276/64